



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 01 Desember 2016

Halaman: 2

Plt Wali Kota Siapkan Saber Pungli Sekaten

Merespons Keluhan Masyarakat soal Tarif Parkir Aji Mumpung

JOGJA - Persoalan parkir di Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) selalu terulang setiap tahun. Keluhan yang banyak disuarakan apalagi jika bukan

terkait tarif parkir yang tinggi dan tidak sesuai peraturan.

Sejak awal PMPS 2016 dibuka, di media sosial sudah ramai memposting foto tiket parkir. Di antaranya tarif parkir motor yang mencapai Rp 5.000 dan mobil hingga Rp 10.000 untuk sekali parkir.

Karcis parkir yang dipakai pun tidak sesuai karcis resmi dari

Pemkot Jogja. Bahkan ada yang mencantumkan logo Keraton Jogja. Padahal berdasarkan Perda Kota Jogja No 5/2012 tentang Retribusi Jasa Umum, retribusi satuan ruang parkir tidak tetap untuk kendaraan roda empat dan roda tiga hanya Rp 3 ribu. Sementara kendaraan roda dua ditarik tarif Rp 2 ribu.

Tapi sepertinya belum ada so-

lusi untuk hal itu. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja Wirawan Hario Yudho berkilah, berdasar Perwal Jogja Nomor 52/2012 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang kepada Camat, parkir insidentil di PMPS ditangani oleh kecamatan.

Kewenangan Dishub Kota Jogja hanya mengawasi kantong parkir reguler di luar tepi jalan

umum dan kantong parkir insidentil. "Ya Memang seperti itu. Jika diundang Polrestabes Jogja untuk klarifikasi parkir yang melanggar aturan, kami akan menjawab seperti itu," ungkapnya kemarin (30/11).

Tapi diakui tarif yang diberlakukan para tukang parkir di PMPS 2016 saat ini menyalahi aturan di Perda yang mengatur tentang

tarif parkir insidentil. Terkait hal itu, Wirawan mendukung jika harus dilakukan penertiban. "Akan kami koordinasikan untuk melakukan evaluasi di tingkat pemkot, timnya ada dari Disperindagkotan," tuturnya.

Langkah tegas juga akan dilakukan Plt Wali Kota Jogja Sulistyono yang mengaku akan membentuk petugas Sapu Bersih

Pungutan Liar (Saber Pungli) untuk menelusuri hal itu. Sulis menegaskan tidak akan main-main, termasuk jika ada PNS yang terlibat, akan ditindak tegas.

"Kami akan tegur pihak kecamatan karena tarif yang ditetapkan tidak sesuai. Kalau ada oknum yang bermain di sana, kami tindaklanjuti," tegas Sulistyono. (pra/laz/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per 3. Kecamatan/Kemantren Gondomanan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005